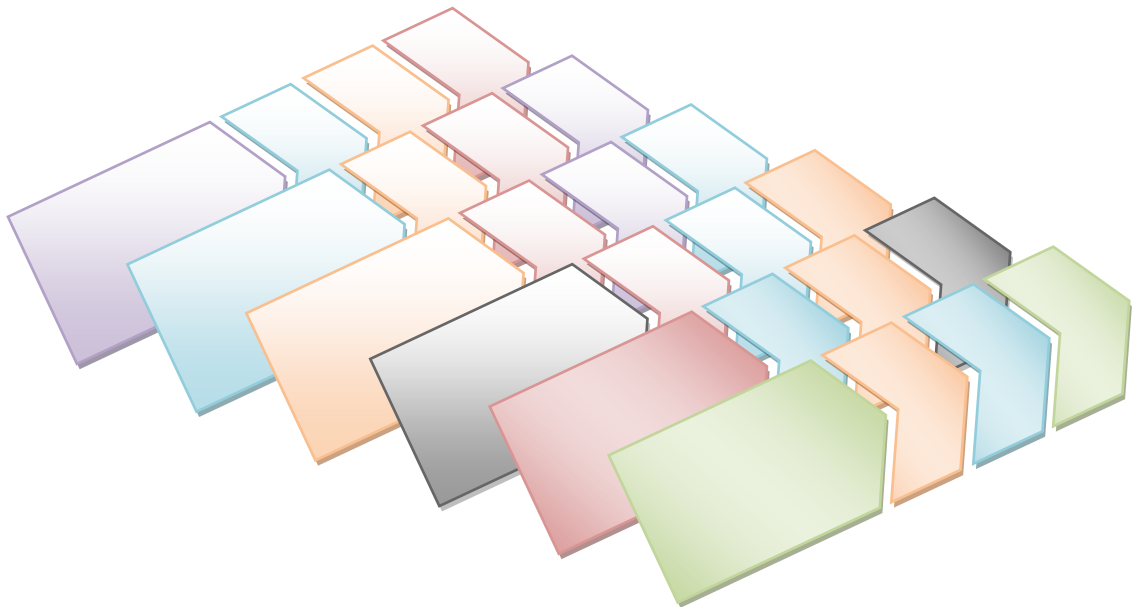


**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
AUDITED TAHUN ANGGARAN 2023**

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI BARAT
018.09.3400.500957.KD**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**



Alamat Kantor :
Komplek Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju
SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mamuju, 31 Desember 2023,
Kuasa Pengguna Anggaran,



[Handwritten Signature]
Repelita Kallo, S.TP, M.Si
NIP: 196806102005012002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I Laporan Realisasi Anggaran	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas	6
V Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.1. Penerimaan Bukan Pajak	14
B.2. Belanja	15
B.3. Belanja Pegawai	16
B.4. Belanja Barang	17
B.5. Belanja Modal	17
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
C.1. Aset Lancar	20
C.1.1. Persediaan	20
C.2. Aset Tetap	20
C.2.1. Tanah	20
C.2.2. Peralatan dan Mesin	20
C.2.3. Gedung dan Bangunan	21
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	21
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	21
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	21
C.3. Aset Lainnya	22
C.3.1. Aset Tak Berwujud	22
C.3.2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	22
C.5. Ekuitas	22
C.5. Ekuitas	22

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
D.1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	23
D.2.	Beban Pegawai	23
D.3.	Beban Persediaan	24
D.4.	Beban Barang dan Jasa	25
D.5.	Beban Pemeliharaan	25
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	26
D.7.	Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat	26
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	26
D.9.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	27
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
E.1.	Ekuitas Awal	28
E.2.	Surplus/Defisit-LO	28
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	28
E.4.	Transaksi Antar Entitas	28
E.5.	Ekuitas Akhir	29
F.	Pengungkapan lainnya	30



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuju, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Repelita Kallo, S.TP, M.Si
196806102005012002



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp122,254,996.00 atau mencapai 156,85% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp77,940,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp5,075,675,553.00 atau mencapai 88.01% dari alokasi anggaran sebesar Rp5,762,050,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp18,650,113,963.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp550,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp18,599,863,963.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp49,700,000.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp18,650,113,963.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 13,680,000.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5,650,984,971.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5,637,304,971.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp109,114,996.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5,528,189,975.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 11,616,311,381.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5,528,189,975.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp7,609,112,000.00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4,952,880,557.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp18,650,113,963.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPSIP SULAWESI BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	77,940,000.00	122,254,996.00	158.85	54,225,083.00
Jumlah Pendapatan		77,940,000.00	122,794,996.00	158.85	54,225,083.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	1,797,975,000.00	1,738,655,397.00	96.70	1,933,418,404.00
Belanja Barang	B.4.	3,964,075,000.00	3,337,020,156.00	84.18	2,776,544,945.00
Belanja Modal	B.5.	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00
Jumlah Belanja		5,762,050,000.00	5,075,675,553.00	88.01	4,880,963,349.00

II. NERACA

BPSIP SULAWESI BARAT
NERACA
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	550,000.00	50,925,000.00
Jumlah Aset Lancar		550,000.00	120,925,000.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	7,984,672,000.00	375,560,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	6,129,945,394.00	6,129,945,394.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	11,248,998,000.00	11,248,998,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	180,680,000.00	180,680,000.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	106,183,200.00	106,183,200.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	72,000,000.00	72,000,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-7,122,614,631.00	-6,603,110,213.00
Jumlah Aset Tetap		18,599,863,963.00	11,814,800,213.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	61,373,573.00	61,373,573.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-11,673,573.00	-11,673,573.00
Jumlah Aset Lainnya		49,700,000.00	49,700,000.00
Jumlah Aset		18,650,113,963.00	11,616,311,381.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.4.1.	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban	C.4.2.	0.00	0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1.	18,650,113,963.00	11,616,311,381.00
Jumlah Ekuitas		18,650,113,963.00	11,616,311,381.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		18,650,113,963.00	11,616,311,381.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPSIP SULAWESI BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	13,680,000.00	84,987,500.00
JUMLAH PENDAPATAN		13,680,000.00	84,987,500.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	1,738,655,397.00	1,933,418,404.00
Beban Persediaan	D.3.	100,105,000.00	185,273,000.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2,212,204,815.00	1,757,263,050.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	412,823,200.00	404,150,710.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	667,692,141.00	519,648,185.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0.00	0.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	0.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	519,504,418.00	613,066,059.00
JUMLAH BEBAN		5,650,984,971.00	5,412,819,408.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		- 5,637,304,971.00	-5,327,831,908.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	97,574,996.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11,540,000.00	86,820,190.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		109,114,996.00	86,820,190.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		- 5,528,189,975.00	- 5,241,011,718.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPSIP SULAWESI BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	11,616,311,381.00	12,061,347,440.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	- 5,528,189,975.00	- 5,241,011,718.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	7,609,112,000.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1.	7,609,112,000.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	4,952,880,557.00	4,795,975,659.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	7,033,802,582.00	- 445,036,059.00
EKUITAS AKHIR	E.6.	18,650,113,963.00	11,616,311,381.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP Sulawesi Barat

Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Barat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, mempunyai tugas pokok antara lain: 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, 2) Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, dan 4) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Sulawesi Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPSIP Sulawesi Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP Sulawesi Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP Sulawesi Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPSIP Sulawesi Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	77,940,000.00	77,940,000.00
Jumlah Pendapatan	77,940,000.00	77,940,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,943,573,000.00	1,797,975,000.00
Belanja Barang Operasional	869,083,000.00	899,083,000.00
Belanja Barang Non Operasional	195,500,000.00	1,146,500,000.00
Belanja Barang Persediaan	79,772,000.00	44,300,000.00
Belanja Jasa	351,600,000.00	411,600,000.00
Belanja Pemeliharaan	343,317,000.00	413,317,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	300,400,000.00	1,049,275,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0.00	0.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
Jumlah Belanja	4,083,245,000.00	5,762,050,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp122,254,996.00 atau mencapai 126.85% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp77,940,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Lain-Lain	0.00	108,574,996.00	-100.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	77,940,000.00	13,680,000.00	17,55
Jumlah	77,940,000.00	122,254,996.00	126.85

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 43.85% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lain-Lain	108,574,996.00	190.00	100.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	13,680,000.00	84,987,500.00	-83.90
Jumlah	122,254,996.00	84,987,690.00	43.85

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp5,075,675,553.00 atau 88.09% dari anggaran belanja sebesar Rp5,762,050,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	1,797,975,000.00	1,738,655,397.00	96.70
Belanja Barang	3,964,075,000.00	3,337,020,156.00	84.18
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Total Belanja Kotor	5,762,050,000.00	5,075,675,553.00	88.09
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Total Belanja	5,762,050,000.00	5,075,675,553.00	88.09

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 18.05% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan kegiatan kerjasama yang mengakibatkan realisasi Belanja Barang TA 2023 naik

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	1,797,975,000.00	1,933,418,404.00	-7.01
Belanja Barang	3,964,075,000.00	2,776,544,945.00	42.77
Belanja Modal	0.00	171,000,000.00	-100.00
Total Belanja	5,762,050,000.00	4,880,963,349.00	18.05

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,797,975,000.00 dan Rp1,933,920,130.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 7.01% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Perpindahan jabatan fungsional pegawai TA.2023 pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Barat
2. Adanya beberapa pegawai yang pensiun dan pindah pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Barat

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,797,975,000.00	1,933,920,130.00	-7.03
Belanja Lembur	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	1,797,975,000.00	1,933,920,130.00	-7.03
Pengembalian Belanja Pegawai	0.00	501,726.00	-100.00
Jumlah Belanja	1,797,975,000.00	1,933,418,404.00	-7.01

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,339,820,156.00 dan Rp2,776,544,945.00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 20.29% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- 1 Adanya kegiatan kerjasama yang mengakibatkan penambahan pagu pada akun belanja barang TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	893,282,520.00	806,070,500.00	10.82
Belanja Barang Non Operasional	1,027,161,600.00	622,399,800.00	65.03
Belanja Barang Persediaan	44,300,000.00	95,483,000.00	53.60
Belanja Jasa	294,560,695.00	328,792,750.00	-10.41
Belanja Pemeliharaan	412,823,200.00	404,150,710.00	2.14
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	667,692,141.00	519,648,185.00	28.49
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	3,339,820,156.00	2,776,544,945.00	20.29
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	3,339,820,156.00	2,776,544,945.00	20.29

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp171,000,000.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya revisi pagu anggaran belanja modal yang mengakibatkan tidak adanya realisasi belanja modal TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	99,000,000.00	-100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	72,000,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	171,000,000.00	-100.00
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	171,000,000.00	-100.00

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp99,000,000.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Adanya revisi pagu anggaran belanja modal yang mengakibatkan tidak adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	99,000,000.00	100.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	99,000,000.00	100.00
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	99,000,000.00	100.00

B.5.1. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp72,000,000.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 100.00% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Tidak adanya pagu akun belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	72,000,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	72,000,000.00	-100.00
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	72,000,000.00	-100.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp550,000.00 dan Rp56,355,000.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bahan konsumsi	550,000.00	56,355,000.00
Jumlah	550,000.00	56,355,000.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,984,672,000.00 dan Rp375,560,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,129,945,394.00 dan Rp6,129,945,394.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	6,129,945,394.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0.00
Saldo per 31 Desember 2023	6,129,945,394.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-5,803,529,700.00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	326,415,694.00

Tidak terdapat mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11,248,998,000.00 dan Rp11,248,998,000.00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp180,680,000.00 dan Rp180,680,000.00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPSIP Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp106,183,200.00 dan Rp106,183,200.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-7,122,614,631.00 dan Rp-6,603,110,213.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	6,129,945,394.00	-5,803,529,700.00	326,415,694.00
2.	Gedung dan Bangunan	11,248,998,000.00	-1,279,937,602.00	9,969,060,398.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	180,680,000.00	-39,147,329.00	141,532,671.00
4.	Aset Tetap Lainnya	106,183,200.00	0.00	106,183,200.00
Akumulasi Penyusutan		17,665,806,594.00	-7,122,614,631.00	10,543,191,963.00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp61,373,573.00 dan Rp61,373,573.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	49,700,000.00
Software	11,673,573.00
Jumlah	61,373,573.00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPSIP Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-11,673,573.00 dan Rp-11,673,573.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	61,373,573.00	-11,673,573.00	49,700,000.00
	Akumulasi Penyusutan	61,373,573.00	-11,673,573.00	49,700,000.00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18,650,113,963.00 dan Rp11,616,311,381.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp122,254,996.00 dan Rp84,986,500.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	13,680,000.00	84,986,500.00	-83.90
Pendapatan Lain-Lain	108,574,996.00	0.00	100.00
Jumlah	122,254,996.00	84,986,500.00	43.85

Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 sebesar Rp122,254,996.00 diperoleh dari hasil penjualan benih kegiatan UPBS Per 31 Desember 2023 dan penerimaan hasil penjualan peralatan dan mesin serta penerimaan belanja pegawai tahun yang lalu.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,738,655,397.00 dan Rp1,933,418,404.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,183,210,900.00	1,274,316,200.00	-7.15
Beban Pembulatan Gaji PNS	19,444.00	20,633.00	-5.76
Beban Tunj. Anak PNS	20,424,114.00	19,451,398.00	-5.00
Beban Tunj. Beras PNS	64,019,280.00	66,336,720.00	-3.49
Beban Tunj. Fungsional PNS	153,960,000.00	246,570,000.00	-37.56

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Tunj. PPh PNS	9,775,969.00	10,972,415.00	-10.90
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000.00	25,740,000.00	-2.10
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	74,540,758.00	73,054,038.00	-2.04
Beban Tunjangan Umum PNS	31,695,000.00	22,625,000.00	40.09
Beban Uang Lembur	0.00	0.00	0.00
Beban Uang Makan PNS	167,431,000.00	194,332,000.00	-13.84
Beban Gaji Pokok PPPK	5,933,000.00	0.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	92.00	0.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,080,000.00	0.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	144,840.00	0.00	100.00
Beban Uang Makan PPPK	1,221,000.00	0.00	100.00
Jumlah	1,738,655,397.00	1,933,418,404.00	-10.07

Realisasi Beban Pegawai TA 2023 turun sebesar 10.07%. dari realisasi TA 2022, ini disebabkan karena beberapa pegawai yang mutasi pindah dan perpindahan jabatan fungsional pegawai TA 2023 pada BPSIP Sulbar.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp100,105,000.00 dan Rp185,273,000.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	56,355,000.00	95,483,000.00	-40.98
Beban Persediaan konsumsi	43,750,000.00	89,790,000.00	-51.28
Jumlah	100,105,000.00	185,273,000.00	-45.97

Realisasi Beban Persediaan TA 2023 turun sebesar 45.97%. dari realisasi TA 2022, ini disebabkan karena adanya pengurangan pagu anggaran belanja persediaan dan

tidak adanya pagu anggaran belanja persediaan covid dari tahun sebelumnya pada BPSIP Sulawesi Barat.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,212,204,815.00 dan Rp1,757,263,050.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	899,971,600.00	95,599,800.00	100.00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	0.00	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	110,690,000.00	509,800,000.00	-78.29
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	6,000,000.00	-100.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	93,000,000.00	81,600,000.00	13.97
Beban Honor Output Kegiatan	16,500,000.00	17,000,000.00	-2.94
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	770,650.00	-100.00
Beban Jasa Profesi	56,800,000.00	0.00	100.00
Beban Keperluan Perkantoran	797,482,520.00	718,470,500.00	11.00
Beban Langganan Listrik	174,546,487.00	175,512,232.00	-0.55
Beban Langganan Telepon	63,214,208.00	50,509,868.00	25.15
Beban Sewa	0.00	102,000,000.00	-100.00
Jumlah	2,212,204,815.00	1,757,263,050.00	25.89

Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2023 naik sebesar 25.89%. dari realisasi TA 2022, ini disebabkan karena adanya penambahan pagu anggaran akun belanja barang akibat adanya tambahan kegiatan kerjasama dari tahun sebelumnya.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp412,823,200.00 dan Rp404,150,710.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125,277,000.00	125,008,000.00	0.22
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	0.00	0.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	14,975,000.00	16,965,000.00	-11.73
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	272,571,200.00	262,177,710.00	3.96
Jumlah	412,823,200.00	404,150,710.00	2.14

Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 naik sebesar 2.14% dari realisasi TA 2022, ini disebabkan karena adanya penambahan biaya pemeliharaan kendaraan dan gedung dari tahun sebelumnya.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp667,692,141.00 dan Rp519,648,185.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	663,402,141.00	500,398,185.00	32.57
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,290,000.00	19,250,000.00	-77.71
Jumlah	667,692,141.00	519,648,185.00	28.49

Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 naik sebesar 28.49% dari realisasi TA 2022, ini disebabkan karena adanya pengurangan kegiatan Rapat/sosialisasi secara online sehingga meningkatkan belanja Perjalanan Dinas TA 2023.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp519,504,418.00 dan Rp613,066,059.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	235,985,872.00	235,985,872.00	0.00
Beban Penyusutan Irigasi	6,022,666.00	6,022,666.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	277,495,880.00	371,057,521.00	-25.22
Jumlah	519,504,418.00	613,066,059.00	-15.26

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 turun sebesar 15.26%. dari realisasi TA 2022, ini disebabkan tidak adanya penambahan peralatan dan mesin pada TA 2023.

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	97,574,996.00	0.00	100.00
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,540,000.00	190.00	100.00
Jumlah	109,114,996.00	190.00	100.00

Realisasi Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 naik sebesar 100.00% dari realisasi TA 2022, ini disebabkan karena adanya pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dari tahun sebelumnya.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 11,616,311,381.00 dan Rp12,061,347,440.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-5,528,189,975.00 dan Rp-5,241,011,718.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,609,112,000.00 dan Rp0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4,952,880,557.00 dan Rp4,795,975,659.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,075,675,553.00
Diterima dari Entitas Lain	-122,794,996.00
Jumlah	4,952,880,557.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-122,794,996.00 sedangkan DKEL sebesar Rp5,075,675,553.00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18,650,113,963.00 dan Rp11,616,311,381.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Aset Tanah Yang Belum Bersertipikat

Terdapat 1 (satu) bidang tanah yang belum bersertipikat dalam Neraca yang merupakan hasil hibah dari Pemerintah Prov. Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tanah Hibah
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Luas M ²	Tahun Perolehan	Lokasi	Ket
1.	Tanah Kebun Percobaan	149.990	2019	Desa Batupanga Da'ala Kec. Luyo kab. Polewali Mandar	Dalam proses pengurusan sertipikat

F.2. Piutang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti

Terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang memiliki kelebihan pembayaran tunjangan fungsional akibat adanya perubahan jabatan fungsional Peneliti ke jabatan fungsional Penyuluh dan Analis Standardisasi periode bulan September 2022 - Juli 2023. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Piutang Kelebihan Pembayaran Tunjangan
Per 31 Desember 2023

No	Nama	Selisih Perbulan	Tahun 2022	Tahun 2023	Total
1.	Ir. Marthen P. Sirappa, M.Si	3,700,000	14,800,000	29,600,000	44,400,000
2.	Ketut Indrayana, S.TP	915,000	3,660,000	8,235,000	11,895,000
3.	Hesti Rahasia, S.Pt, M.Si	915,000	3,660,000	8,235,000	11,895,000
Total			22,120,000	46,070,000	68,190,000